



INFO BPK

INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME

EDISI IV/2016

UTAMA

10.527 KASUS KERUGIAN NEGARA/DAERAH SENILAI RP1,02 TRILIUN BELUM TERSELESAIKAN



Efektivitas dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Azis pada Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2015 kepada Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. Penyerahan

IHPS tersebut dilaksanakan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (12/4).

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan, bahwa IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah tahun 2003-2015, dengan status telah ditetapkan sebanyak 22.539 kasus senilai Rp1,46 triliun. Tingkat penyelesaian kerugian tersebut menunjukkan 11.864

kasus telah dilunasi senilai Rp282,98 miliar (19%). Sementara itu, 156 kasus dihapuskan senilai Rp8,42 miliar (1%) dan 4.847 kasus telah diangsur senilai Rp143,76 miliar (10%). Sedangkan 10.527 kasus belum terselesaikan. "Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 10.527 kasus senilai Rp1,02 triliun (70%)," ungkap Ketua BPK.

Pada IHPS Semester II Tahun 2015, diungkapkan Ketua BPK, bahwa BPK menemukan sebanyak 6.548 temuan yang memuat 8.733 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 2.175 kelemahan SPI dan 6.558 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, 2.537 permasalahan merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp9,87 triliun," ungkapnya. Permasalahan berdampak finansial tersebut terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp710,91 miliar, potensi kerugian negara senilai Rp1,15 triliun, dan kekurangan penerimaan senilai Rp8 triliun.

IHPS II Tahun 2015 memuat ringkasan dari 704 LHP, yang terdiri atas 92 LHP pada Pemerintah Pusat, 571 LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD, serta 41 LHP pada BUMD dan badan lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis pemeriksaannya, LHP dimaksud terdiri atas 35 LHP Keuangan, 277 LHP Kinerja, dan LHP Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 392.

Mengakhiri sambutannya, Ketua BPK yang hadir dengan didampingi oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari dan para Anggota BPK berharap agar informasi yang disampaikan IHPS dan LHP BPK Semester II Tahun 2015 dapat mendukung tugas dan wewenang DPR. "Salah satu pihak yang dapat mendorong efektivitas tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK adalah pengawasan yang intensif dari Pimpinan dan para Anggota DPR," pungkas Ketua BPK.

DARI REDAKSI

Salam hangat dari redaksi Buletin Info BPK RI kepada seluruh pembaca.

Mengawali edisi kali ini, Buletin Info BPK RI akan mengulas penyampaian IHPS dan LHP BPK RI Semester II Tahun 2015 kepada DPR RI. IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah tahun 2003-2015, yang memuat ringkasan dari 704 LHP yang terdiri dari 92 LHP pada Pemerintah Pusat, 571 LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD, serta 41 LHP pada BUMD dan badan lainnya.

Penindaklanjutan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang diikuti oleh Inspektorat Pemda se-Provinsi Sumatera Utara, pengaduan LSM dan Wartawan ke BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara terkait dengan temuan LHP serta penyalahgunaan anggaran pengelolaan PNB pada Universitas Halu Oleo, pelaksanaan kegiatan ekspose penggunaan aplikasi SIMDA dalam penyusunan LKPD berbasis akrual dan implementasinya dalam menunjang pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2015 turut menjadi ulasan dalam rubrik lintas perwakilan.

Selain itu, edisi kali ini juga akan membahas pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksana BPK Tahun 2016, pemberian opini WTP atas Perum Peruri, dan penerimaan LKPP (unaudited) tahun 2015 oleh BPK.

Keterlibatan BPK secara aktif sebagai Ketua Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI-WGEA) dalam kegiatan Workshop International terkait dengan pemeriksaan keanekaragaman hayati (biodiversity) yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog berbagai pihak dalam rangka mengeksplorasi, memperkuat pemahaman dan menyumbangkan ide-ide dan pilihan mengenai cara-cara untuk meningkatkan mekanisme untuk meninjau pelaksanaan Target Aichi dan Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.

BPK RI juga melakukan pertemuan teknis ke-15 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia untuk melakukan Sharing Knowledge dalam berbagai bidang, diantaranya bidang e-audit, pemeriksaan atas registrasi dan akomodasi pelaksanaan haji, pemeriksaan dan quarry management, serta pemeriksaan atas road maintenance.

Selamat membaca dan berkarya!

DAFTAR ISI

- DARI REDAKSI
- 10.527 KASUS KERUGIAN NEGARA/DAERAH SENILAI RP1,02 TRILIUN BELUM TERSELESAIKAN
- BPK SINERGIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DENGAN KESETJENAN DAN PENUNJANG
- BPK TERIMA LKPP (UNAUDITED) TAHUN 2015
- BPK MEMBERIKAN OPINI WTP ATAS PERUM PERURI
- BPK MENYERAHKAN LAPORAN AUDIT KINERJA BPJS KESEHATAN
- BERITA FOTO
- KABAR SELINTAS
- LINTAS PERWAKILAN
- KOLOM
- CASCISCUS
- KOREK PERS

» KABAR SELINTAS

KETERLIBATAN BPK SECARA AKTIF SEBAGAI KETUA WORKING GROUP ON ENVIRONMENTAL AUDITING (INTOSAI-WGEA) DALAM KEGIATAN WORKSHOP INTERNATIONAL TERKAIT PEMERIKSAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (BIODIVERSITY)



Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, tampil sebagai salah satu presenter dalam *Friends of the Convention on Biological Diversity (CBD) workshop* tentang *Auditing Biodiversity* di Chateau de Bossey-The Ecumenical Institute, Bogis-Bossey, Geneva-Switzerland. *Workshop* yang diadakan oleh CBD selama 3 hari dari tanggal 21-23 Maret 2016 tersebut bertujuan untuk memfasilitasi dialog berbagai pihak dalam rangka mengeksplorasi, memperkuat pemahaman dan menyumbangkan ide-ide dan pilihan mengenai cara-cara untuk meningkatkan mekanisme untuk meninjau pelaksanaan Target Aichi dan Rencana Strategis Keaneekaragaman Hayati 2011-2020.

Wakil Ketua memaparkan presentasi yang berjudul *The Role of SAIs in Auditing Environmental Issue and the Implementation of CBD/MEA* yang menyoroti peran audit dan SAI, pedoman pemeriksaan untuk CBD/*Convention/Agreement* yang dilaksanakan oleh SAI terkait (*Auditing Biodiversity: Guidance for Supreme Audit Institutions, 2007*) dan keterlibatan dalam kegiatan INTOSAI WGEA, RWGEA dan SAI baik dalam tingkat nasional maupun internasional (global/regional WGEA). Dalam kegiatan ini, Wakil Ketua didampingi oleh Sekjen BPK, Hendar Ristriawan; Kepala Auditorat II.A, Edward G.H. Simanjuntak.

Delegasi BPK juga melakukan pertemuan dalam upaya penjabakan kemungkinan kerja sama antara INTOSAI WGEA dengan CBD yang diwakili oleh *Executive Secretary of CBD*, Mr Braulio Ferreira de Souza Dias. Keinginan INTOSAI-WGEA tersebut disambut baik dan langkah-langkah menuju terjalannya kerja sama tersebut telah dapat dilaksanakan oleh

kedua belah pihak.

Selain itu, Delegasi BPK juga melakukan pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI (PTRI) untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya untuk memberikan dukungan bagi PTRI dalam meningkatkan upaya Pemerintah RI berkiprah di kancan internasional.

Dalam hal ini Wakil Ketua dan Sekjen BPK juga berbagi prestasi dan pengalaman BPK dalam kegiatan Internasional.

Dalam pertemuan di PTRI, hadir diantaranya Duta Besar/Watapri, Triyono Wibowo, *Deputy Permanent Representative I*, Michael Tene dan *Deputy Permanent Representative II*, Sondang Anggraini.

belah pihak melakukan *sharing of knowledge* dalam berbagai bidang, yaitu bidang *e-audit*, pemeriksaan atas registrasi dan akomodasi pelaksanaan haji, pemeriksaan atas *quarry management*, serta pemeriksaan atas *road maintenance*. Setelah acara tersebut, kedua belah pihak melakukan diskusi lanjutan terkait topik kerjasama berikutnya, yang kemudian dituangkan dalam *technical agreement ke-15*. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Auditor Utama KN IV, Saiful Anwar Nasution dari pihak BPK, dan *Director JAN Malaysia*, Zulkipli Bin Abdullah.

Technical Agreement ke-15 berisikan topik-topik kerjasama bilateral, yaitu: *sharing of knowledge* dalam bidang pemeriksaan atas pengelolaan energi terbarukan, pemeriksaan atas pembangunan ekonomi di daerah perbatasan, pemeriksaan atas manajemen sertifikat halal, pemeriksaan atas pengelolaan perkebunan kelapa sawit, pemeriksaan atas pengelolaan barang-barang sitaan oleh aparat penegak hukum, serta pemeriksaan dalam bidang *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

PERTEMUAN TEKNIS KE-15 ANTARA BPK RI DAN JAN MALAYSIA

BPK dan Jabatan Audit Negara Malaysia melakukan pertemuan teknis ke-15 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 11-13 April 2015. Delegasi BPK dipimpin oleh Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, sementara Delegasi JAN Malaysia dipimpin oleh *Deputy Auditor General* JAN Malaysia, Dato Mustafa Bin Hj. Saman. Turut hadir pula Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Akhmad Daya Handasah Irfan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua



» RENUNGAN

“

Setiap saat kamu akan dihadapkan pada dua pilihan yang berbeda dimana setiap pilihan ada konsekuensi dan resikonya masing-masing. Maka gunakanlah selalu pertimbangan yang bijak atas setiap pilihan yang akan kamu lakukan.

”

BPK TERIMA LKPP (UNAUDITED) TAHUN 2015



Tahun 2015 merupakan titik perubahan terbesar dalam sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu mulai diberlakukannya pelaporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di seluruh instansi pemerintahan. BPK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka

mempersiapkan dan menerapkan SAP berbasis akrual tahun 2015. Hal itu disampaikan Ketua BPK, Harry Azhar Azis dalam sambutannya setelah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (*Unaudited*) Tahun 2015 yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang P.S. Brodjonegoro dalam kegiatan “Penyerahan LKPP (*Unaudited*) dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2015” di Auditorium BPK Pusat, Rabu (30/3).

BPK, ungkap Ketua BPK, telah melakukan Pemeriksaan Kinerja Persiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual pada semester II tahun 2014 dan Pemeriksaan Kinerja Pengendalian Internal Terhadap LK Berbasis Akrual pada semester II tahun 2015. “Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mempersiapkan dan menerapkan SAP berbasis akrual tahun 2015,” tegasnya.

Sementara itu, Menkeu mengatakan, masih diperlukan upaya lebih dari pemerintah untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik. “Pemerintah terus melakukan perbaikan agar pertanggungjawaban APBN dapat mencapai kualitas terbaik dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Menkeu dihadapan para Anggota BPK, Pejabat dan Pemeriksa di lingkungan BPK serta Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara yang hadir pada kegiatan tersebut.

BPK MEMBERIKAN OPINI WTP ATAS PERUM PERURI



Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi, menyerahkan LHP kepada Dirut Perum Peruri Prasetio, disaksikan Dewan Pengawas, Direksi, dan pejabat di lingkungan Perum Peruri dan BPK pada Selasa (22/3), di Kantor Pusat Perum Peruri, Jakarta. Anggota BPK mengapresiasi LHP LK Perum Peruri Tahun 2015 yang mendapatkan Opini WTP, walaupun masih ada beberapa catatan yang diberikan kepada direksi dan komisar untuk dapat ditidakanjuti dalam 60 hari ke depan.

Sementara itu, Dirut Perum Peruri berkomitmen untuk dapat menyelesaikan beberapa catatan yang diberikan oleh BPK dalam waktu yang secepatnya, seperti administrasi pencatatan yang merupakan komponen dalam sistem pengendalian internal, setoran pajak transaksi dengan Nepal, sewa lahan, dan hutang pajak.

BPK MENYERAHKAN LAPORAN AUDIT KINERJA BPJS KESEHATAN

Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar, menyerahkan LHP Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2014-Semester I Tahun 2015 kepada Dirut BPJS Kesehatan, Fahmi Idris di Kantor Pusat BPK, Selasa (29/3). Dalam pemeriksaan ini, BPK mengidentifikasi beberapa permasalahan yang masih timbul dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Permasalahan itu diantaranya, dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan terjadi penurunan rasio biaya pelayanan terhadap pendapatan iuran, yang dapat digunakan untuk memastikan ketersediaan dana dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, selain itu, belum memadainya penetapan standar verifikator yang bertugas memverifikasi klaim atas pelayanan kesehatan. Atas permasalahan tersebut, Anggota BPK berharap BPJS Kesehatan dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 60 hari ke depan.

